BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

1.1 KAJIAN PUSTAKA

1.1.1 Kinerja

1.1.1.1 Pengertian Kinerja

Informasi akuntansi sangat bermanfaat untuk menilaipertanggungjawaban kinerja manajer. Karena penilaian kinerja pada dasarnya merupakan penilaian perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang dimainkannya dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kemungkinan yang lain adalah digunakannya informasi akuntansi bersamaan dengan informasi non akuntansi untuk menilai kinerja manajer atau pimpinan perusahaan.

Menurut Mahmudin (2007:25) definisi kinerja adalah sebagai berikut : "Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi, organisasi yang teruang dalam strategi suatu organisasi."

Menurut Hayadi dan Kristiani (2007:103) definisi kinerja adalah sebagai berikut :

"Kinerja merupakan gambaran tingkat suatu pelaksanaan kegiatan atau program dalam usaha mencapai tujuan, misi, dan visi organisasi".

Dari definisi diatas disimpulkan bahwa istilah kinerja sering dipakai untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok individu. Pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang mempuyai tujuan strategis organisasi. Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja sebagai dasar bagi pengelola organisasi untuk perbaikan kinerja periode berikutnya.

1.1.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Darma (2008:66) faktor yang mempengaruhi kinerja sebagai berikut :

> "faktor-faktor tingkat kinerja staf meliputi:mutu pekerjaan, jumlah pekerjaan, efektifitas biaya dan inisiatif. Sementarakarakteristik individu yang mempengaruhi kinerja meliputi: umur, jenis kelamin,pendidikan, lama kerja, penempatan kerja dan lingkungan kerja (rekan kerja, atasan,organisasi, penghargaan dan imbalan)."

Dari faktor-faktor diatas disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja muncul dalam karakteristik perorangan, yaitu dimulai dengan fakor lingkungan dan kemapuannya yang sangat berpengaruh karena dari sana akan ditemukan semangat dan motivasi, sehingga dalam pekerjaannya tumbuh rasa tanggung jawab agar targetnya dapat tercapai.

1.1.2 Rasio Keuangan

1.1.2.1 Pengertian Rasio Keuangan

Rasio keuangan diperlukan untuk membandingkan resiko pada pemerintahan yang berbeda disamping membantu pemerintah dalam membuat keputusan-keputusan lalu permerintah dalam beberapa periode membandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Pengertian analisis rasio keuangan menurut Sofyan Safitri Harahap (2007:291) sebagai berikut :

"Angka yang diperoleh dari hasil perbandingan satu pos laporan keuangan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang revelan dan signifikan (berarti)"

Menurut Ihyaul Ulum M.D (2009:30), menyebutkan beberapa rasio yang

dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari laporan keuangan daerah antara lain yaitu :

1. "Rasio Kemandirian Daerah
2. Rasio Efektivitas
1. Rasio Efisiensi"

Selain ketiga jenis rasio tersebut, analisis laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan data dari laporan arus kas dan neraca. Adapun mengenai penjelasan jenis-jenis rasio diatas adalah sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat dalam konteks otonomi daerah bias dalam bentu Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Rasio kemandirian dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat / Provinsi \& Pinjaman}}$$

Rasio kemandirian menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi

riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Ditetapkan}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dihasilkan mencapai minimal sebesar 1 atau 100%. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran lebih baik lagi, rasio efektivitas tersebut dibandingkan engan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan Daerah}}$$

Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah ini berhubungan dengan penggunaan anggaran daerah. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat.

Menurut lampiran Rasio Keuangan Kabupaten Bandung rumus yang di gunakan untuk menentukan angka rasio kemandirian adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Analisis perkembangan rasio kinerja kemandirian keuangan adalah bahwa semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan begitu pulasebaliknya

1.1.3 Keuangan Daerah

1.1.3.1 Pengertian keuangan daerah

Menurut Abdul Halim (2007:19) definisi keuangan daerah adalah sebagai berikut :

‘’keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang itu belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak- pihak lain sesuai ketentuan/peraturan undangundang yang berlaku’’.

Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 pengertian keuangan daerah sebagai berikut :

> “keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang didapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang dapat dijadikan miliki daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”

Dari pengertian-pengertian diatas disimpulkan keuangan daerah seuatu barang atau uang adalah suatu kekayaan yang dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah.

1.1.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

1.1.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Dalam mengukur kinerja keuangan perlu dikaitkan antara organisasi perusahaan dengan pusat pertanggungjawaban. Dalam melihat organisasi perusahaan dapat diketahui besarnya tanggung jawab manajer yang diwujudkan dalam bentuk prestasi kerja keuangan.

Pengertian kinerja keuangan Menurut Mulyadi (2007:415) adalah sebagai berikut :

"Kinerja keuangan adalah penentuan secara periodic efektivitas oprasional suatu organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standard an kriteria yang telah diterapkan sebelumnya".

Menurut Mulyadi dan Kristiani (2007:103) menjelaskan pengertian kinerja keuangan adalah sebagai berikut :

"kinerja keuangan merupakan gambaran tingkat suatu pelaksanaan kegiatan atau program dalam usaha mencapai tujuan, misi, visi dan organisasi".

Dari pengertian-pengertian diatas didefinisikan bahwa istilah kinerja keuangan sering dipakai untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok. Pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang mempunyai tujuan strategis organisasi. Hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja sebagai dasar bagi pengelola organisasi untuk perbaikan kinerja periode berikutnya.

1.1.4.2 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Keuangan daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan kemasyarakatan di daerah, oleh karena itu keuangan daerah diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Menurut Erlina (2008:27), Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

> "Pengertian kinerja Keuangan pemerintah Daerah diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi".

Adapun menurut Sucipto (2007:36) Kinerja keuangan pemerintah daerah didefiniskan sebagai berikut :

> "Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang- undangan selama satu periode anggaran".

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan daerah adalah mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan aturan perundang-undangan.

1.1.5 Otonomi Daerah

Otonomi atau *automi* berasal dari bahsa yunani yaitu auto yang berarti sendiri dan Nomous yang berarti hokum atau peraturan. Otonomi adalah pengaturan sendiri atau mengatur diri sendiri. Dengan pengertian dasar tersebut maka rumusan otonomi daerah dalam pasal 1 ayat (5)undang-undang no 32 Tahun 2007 tentang pemerintah daerah :

> "Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan".

Dari uraian diatas bahwa otonomi daerah dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien dan berwibawa yang mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sitem NKRI.

1.1.6 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Nining Yuningsih (2010;97) pengertian pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

"Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus dipacu pertumbuhannya".

Sedangkan menurut Djamu Kertabudi (2007 : 2) pengertian pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

"Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan unang-undang".

Dari definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang dipungur berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diperoleh daerah dari wilayahnya sendiri.

Menurut Djamu kertabudi (2007 : 3) upaya-upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

1. "Pemerintah mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah khususnya dari pemungutan pajak dan retribusi daerah
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan mutu dan kwalitas dan memberikan pelatihan-pelatihan.
3. Melakukan pengawasan dan pelayanan yang baik.
4. Melakukan upaya untuk menarik swasta agar berinvestasi atau membuka usaha-usaha seperti jasa atau industri agar meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi.
5. Memperbaiki infrastuktur dan tempat-tempat wisata agar menambah pendapatan asli daerah (PAD)."

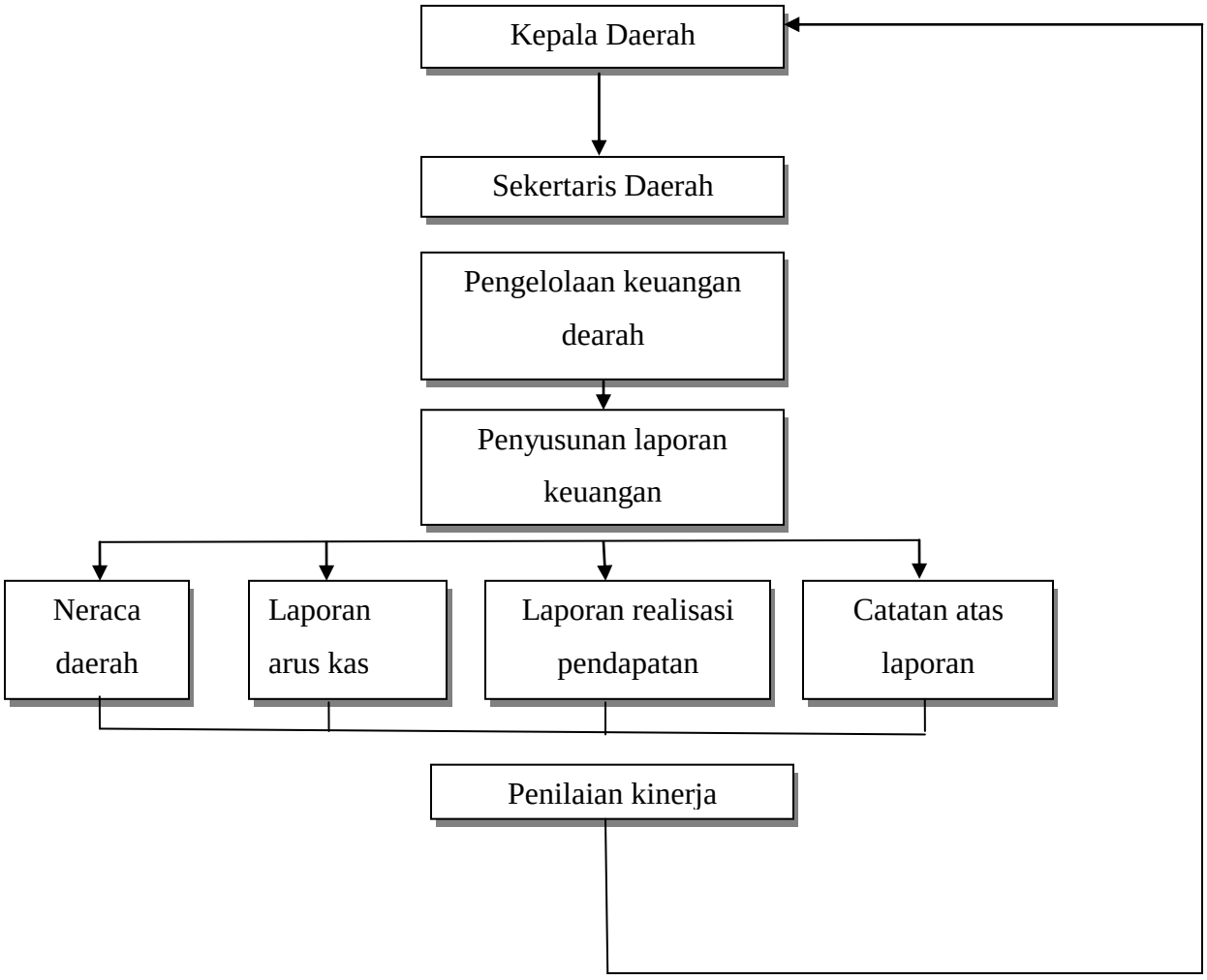
1.2 Kerangka Pemikiran

Perilaku yang berhubungan dengan kinerja adalah yang berkaitan dengantugas-tugas yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan pekerjaan yang dipengaruhi oleh motivasi. Menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2007 : 223) bahwa **"Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya"**

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program dan kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Indikator kinerja merupakan ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja. Evaluasi kinerja merupakan suatu analisis statis dan analisis rasio.

Analisis rasio digunakan untuk melengkapi informasi keuangan yan g dipelukan sehingga. Memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi perkembangan kinerja keuangan. Dengan memperdalam analisis lebih lanjut maka diharapkan dapat memperoleh informasi yang diinginkan untuk mendukung keputusan-keputusan yang diambil.

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis indicator kinerja keuangan pemerintah yang dilihat dari rasio kemandirian kinerja keuangan daerah kabupaten bandung sehingga dalam penelitian ini membandingkan kemandirian kinerja kemandirian di tahun 2007-2009. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dijelaskan dengan gambar berikut :



Gambar kerangka pemikiran

Gambar 2.2